

Resolusi Konflik Komunal dengan Pendekatan Budaya *Maja La'bo Dahu* Antara Warga Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Arihan ^{*1}, Ahmad Zuber², Bagus Haryono³

¹*Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

²FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

³FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Nomor Telepon: 085237544103, Email: Arihan8889@student.uns.ac.id

Abstrak

Keywords:
Konflik;
Resolusi Konflik;
Maja la'bo dahu;
Rekonsiliasi;

Konflik antara desa yang terjadi di Kabupaten Bima menarik untuk dianalisis secara sosiologis, karena melibatkan massa yang berjumlah besar dan memiliki kesamaan identitas Agama, Suku Mbojo, dan Budaya yang sama Maja labo dahu, bahkan masih memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat. Konflik desa Ngali dengan Desa Renda di kecamatan Belo Kabupaten Bima membentuk Solidaritas social yang massif sesama warga desa. Penelitian bertujuan untuk Mendeskripsikan Proses Resolusi konflik Antar warga desa Ngali dan desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan pendekatan budaya maja lab'bo dahu, melalui teori konflik Lewis A. Coser dalam konsep Solidaritas Sosial dan katup Penyelamat sosial (Savety-Valve), resolusi konflik dalam konsep Katup Penyelamat yaitu mendeteksi potensi dan menghindari konflik yang mengarah pada objek aslinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling diklasifikasi berdasarkan Pengaruh, dan Peranan dalam Resolusi konflik. Validitas data dengan teknik triangulasi sumber, Data dianalisis dengan model analisis interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Proses resolusi konflik antar masyarakat desa Ngali dan Renda dilakukan melalui beberapa tahap; pertama, Tercapai kesepakatan damai melalui Musyawarah dan Mufakat dengan menjunjung tinggi nilai Budaya Maja labo dahu. Kedua, penyelesaian berdasarkan kronologis kejadian, konflik berakhir dengan sendirinya ketika hasil konflik berimbang, dan mendapat tekanan dari kepolisian, pada tahap ini cenderung bersifat sementara. Ketiga, pemeliharaan perdamaian dengan tindakan rekonsiliasi dari pemerintah kecamatan Belo dan daerah Bima. Proses resolusi konflik dengan pendekatan adat Musyawarah dan Mufakat (Mbolo ro dampa), pendekatan kearifan lokal Budaya Maja labo dahu yang diikuti dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran. pendekatan hukum oleh pihak kepolisian dengan adil dan merata. Konflik antar desa dilatarbelakangi sifat komunal dari rasa dendam akibat harga diri (Superior) desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain (Inferior) yang dianggap melanggar nilai norma dan etika yang berlaku di desa yang berkonflik. Katup pengaman (safety valve) konsep Coser merupakan budaya dan lembaga hukum itu sendiri. Langkah Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepannya.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bima secara geografis, kehidupan sosial dan kebudayaan memiliki keunikan yang menarik untuk dianalisis, baik dari sisi historis, ekonomi maupun simbol-simbol sosial lainnya. Salah satunya yaitu kondisi kabupaten Bima yang seringkali mengalami konflik antar kampung, antar desa/kelurahan, antar komunitas/kelompok yang dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sulit dimaknai dalam konteks rasionalitas, tetapi hanya bisa dipahami dalam konteks ideasional yang membutuhkan pendalaman dan kajian yang kontekstual dan partisipatif. Kondisi sosial di daerah Bima pasca Orde Baru, mengalami krisis nilai dan “keterisolasian” dari kebudayaannya sendiri. Pemerintahan orde baru membangun pola keberagaman dalam sistem pemerintahan, kebijakan sentralistik pembangunan pemerintah tersebut menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat Bima. Mulai dari pemilihan kepala daerah, perekrutan PNS, promosi jabatan, dan lain sebagainya banyak didominasi oleh intervensi dari pusat, hal ini membuat potensi-potensi sumber daya di daerah “tersingkirkan”, kebudayaan masyarakat dikesampingkan dan munculnya “kecemburuan” elit politik lokal dalam posisi kekuasaan.

Konflik sosial yang berlangsung di masyarakat Bima sendiri tidak bisa dipisahkan dari dampak krisis yang melanda pada masa Orde Baru sebagaimana terjadi di daerah-daerah lainnya. Kebijakan yang tersentralistik dari pemerintah pusat tersebut memberikan keseragaman pola pemerintahan, seperti halnya kepala daerah setingkat Bupati atau Wali kota Bima hampir semuanya di duduki oleh elit politik titipan dari pusat atau keturunan Jawa. Sudah tentu pemahaman mereka atas kebudayaan Bima tidak dimiliki, dan banyak kebijakan-kebijakannya yang bersifat mematikan kebudayaan lokal dengan mengatasnamakan nasionalisme, kesatuan dan kesamaan ditengah keragaman kebudayaan masyarakat. Walaupun demikian, ditengah masyarakat perkotaan yang tengah mengalami transformasi kebudayaan secara tajam, akan tetapi nilai-nilai luhur kebudayaan lokal Bima “*maja labo dahu*” terpelihara dengan baik di wilayah pedalaman dan desa-desa di pelosok pegunungan.

Budaya saling menghormati dan menghargai (*maja labo dahu*) yang sebelumnya melekat kuat dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Bima sebagian besar telah mengalami perubahan. Konsep kebudayaan *maja labo dahu* yang sudah tertanam kuat nilai-nilai Islam, memberikan pesan-pesan moral pada masyarakat Bima dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ditekuninya. Pudarnya nilai kebudayaan pada masyarakat daerah Bima tidak terlepas dari pengaruh kebijakan sentralistik masa Orde Baru. Indikator kuat hilangnya pengaruh nilai budaya *maja labo dahu* dalam sendi kehidupan masyarakat Bima dapat dilihat dari tumbuh suburnya sikap saling memusuhi, saling curiga dan merebaknya konflik sosial antar warga desa disetiap pelosok kota dan kabupaten di Bima hingga kini.

Pada kasus konflik di daerah Bima tersebut, cenderung dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang bersifat kecil dalam kasat mata, seperti perkelahian pemuda di orkestra/hiburan, perdebatan terkait perbedaan pendapat, permasalahan utang-piutang dan lain sebagainya, yang menyebabkan kematian atau luka berat yang kemudian dituntut oleh pihak keluarga darah dibalas darah atau pertanggung jawaban lainnya yang melibatkan bentrokan antar desa. Kasus konflik desa Renda dan Ngali yang terjadi pada 19 Januari 2009, konflik berawal dari perkelahian pemuda, pemuda desa asal Ngali yang kemudian dibacok oleh pemuda yang diduga warga Renda dengan menggunakan senjata tajam, kemudian disusul oleh respon pihak keluarga untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku, ketika tuntutan tidak mendapatkan respon baik, kemudian diikuti oleh rentetan tindakan lainnya, seperti penghadangan jalan oleh warga desa Renda untuk mencari warga desa Ngali, begitu juga sebaliknya sikap warga Ngali. Rentetan dari kasus ini diikuti oleh konflik yang berskala besar yang melibatkan seluruh warga desa untuk saling menjaga dan kompak untuk saling melindungi sesama, hingga berujung pada aksi saling serang-menyerang kampung masing-masing, dan korbanpun tidak terhindarkan, baik yang terkena sabetan senjata tajam, anak panah, maupun peluru dari senjata api rakitan.

Sebagaimana dampak langsung dari terkikisnya nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dan kearifan lokal tersebut, berkembangnya pola konflik sosial yang bersifat komunal. Konflik

sosial tersebut merupakan konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang berkepanjangan dan terjadi (ledakan konflik) dalam waktu yang singkat, akan tetapi memiliki dampak yang membias dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Bima. Diantara konflik-konflik sosial yang mengakar secara kuat pada masyarakat Bima yaitu konflik yang berlangsung antara warga desa Ngali dan Renda, hingga saat ini konflik tersebut belum benar-benar berakhir semenjak berhenti pada akhir tahun 2012, dan berpotensi kembali muncul ketika dipicu oleh faktor yang tepat. Konflik kedua desa tersebut pada umumnya masyarakat Bima beranggapan bahwa konflik kedua desa tersebut adalah konflik yang pertama kali muncul di kabupaten Bima yang disusul oleh konflik antar warga di berbagai tempat lainnya. Keberlanjutan dari konflik ini dapat dilihat melalui berkembangnya pola imitasi kekerasan sosial dan meningkatnya skala tindak kriminal lainnya didalam kehidupan masyarakat Bima. Konflik antar warga desa tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara tiba-tiba, warga yang terlibat konflik hingga memakan banyak korban, mulai dari korban jiwa hingga korban materil dan berujung pada pembakaran kampung desa yang berkonflik.

Konflik sosial yang terjadi antara warga desa Ngali dan desa Renda kabupaten Bima bila ditelusuri secara mendalam bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba atau suatu peristiwa yang disebabkan oleh dinamika perubahan sosial dan pembangunan masa transisi di negeri ini semata. Jika kita menelusuri akar sejarah konflik antar desa di Bima dapat kita menyelami kembali konflik yang terjadi sejak tahun 1908-1910, pada masa kesultanan Bima Sultan Ibrahim. Konflik itu diawali oleh peristiwa perlawanan rakyat Bima atas kolonialisme Belanda yang berlangsung selama tahun 1908-1910 (Perang Ngali, Dena, dan Kala) dan hingga sekarang masih menyisahkan konflik antar desa yang berkelanjutan. Perjuangan masyarakat desa Ngali dalam melawan penjajahan Belanda dengan mengatasnamakan mempertahankan “wibawah Sultan Bima”, pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda yang didukung oleh pasukan kesultanan.

Sejarah kekalahan rakyat pada perang rakyat ini berakibat fatal bagi masyarakat desa Dena, Donggo Kala, desa Ngali dan desa-desa lainnya yang terlibat dalam perlawanan atas kolonial Belanda di Bima. Masyarakat desa Ngali sendiri menderita kekalahan dan kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Hukuman atas tindakan pemberontakan tersebut yaitu harus menanggung hukuman pembuangan tokoh-tokoh rakyat dan penyitaan harta benda dan tanah adat milik warga desa oleh Belanda dijadikan sebagai harta rampasan perang. Kemudian tanah adat tersebut dibagikan kepada warga desa-desa yang dianggap berjasa membantu Sultan dan Belanda. Sementara tanah adat desa yang dianggap memberontak, dibagikan kepada warga desa lain yang dianggap berjasa dalam membantu Belanda selama berlangsungnya perlawanan rakyat. Sejarah panjang perjuangan rakyat pedesaan dalam merebut kembali hak-haknya tersebut hingga pada akhirnya terbentuk sebuah budaya yang disebut tradisi *ndempa ndiha* (perkelahian massal).

Tradisi *ndempa* tersebut dilaksanakan oleh rakyat layaknya turnamen atau hiburan rakyat, dan hanya dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu ketika selesai musim panen (panen padi). Turnamen perkelahian massal dalam tradisi *ndempa* tersebut setidaknya melibatkan empat desa, yaitu desa Ngali, Renda, Sakuru, dan Monta yang ikut disaksikan oleh semua penduduk desa, laki-laki dan pemuda dari keempat desa tersebut dengan aturan main yang cukup sederhana. Peserta harus menjunjung tinggi kehormatan perempuan, peserta dalam posisi duduk tidak boleh diganggu, tidak boleh memakai senjata, dan peserta yang meninggal dunia pada saat turnamen, keluarga tidak diperbolehkan menuntut. Tradisi *ndempa* tersebut berangsur-angsur menghilang sekitar tahun 1950-an (Tajib, 1995: 270). Masyarakat umum di Bima banyak yang memandang bahwa konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda diawali oleh tradisi tersebut.

Konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda telah terjadi dalam beberapa periode; Pertama, konflik di tahun 1909-1911, konflik komunal ini dikarenakan pengaruh dendam akibat kekalahan rakyat Ngali melawan Belanda. Kedua, terjadi pada tahun 1911-1970 terjadi antara desa Ngali dengan desa lainya lewat turnamen tradisi

Ndempa ndiha. Ketiga, konflik antara pemuda dengan menggunakan senjata-senjata tajam yang berlangsung pada tahun 1971-1991. Keempat, terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 2012, konflik terjadi antar desa dengan menggunakan senjata api (senpi rakitan), konflik yang memakan korban yang cukup banyak.

Akar masalah dari konflik Renda dan Ngali secara *laten*, telah terbentuk dari tradisi *ndempa ndiha* (perkelahian massal) tersebut yang kemudian membentuk sebuah bentuk karakter pemuda yang merasa tangguh, dan berjiwa pahlawan (Superior) atau sejenisnya ditengah masyarakat. Hal ini pada umumnya cenderung dilindungi dan dijalankan secara bersama-sama oleh sekelompok pemuda atau masyarakat sebagai nilai persatuan atau solidaritas yang saling mengikat untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tradisi tersebut berjiwa mengakar dalam karakter masyarakat Bima, akan tetapi diikat kuat lagi oleh nilai budaya *maja labo dahu* yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama. Menghargai dan menghormati yang tua sudah menjadi tradisi yang melekat kuat di tengah masyarakat Bima khususnya masyarakat desa Renda dan Ngali.

Bila ditelusuri secara cermat, kasus konflik yang terjadi dimasyarakat Renda dan Ngali cenderung masyarakat “terprovokatif” oleh kondisi yang tidak terkendali. Penyelesaian konflik sosial yang berlangsung selama ini oleh pemerintah yaitu dengan menyalurkan tenaga kepolisian dan militer untuk meredakan konflik. Bentuk penanganan konflik di kabupaten Bima selama ini cenderung bersifat sementara. Kecenderungan pemerintah kabupaten Bima dalam mengambil tindakan meredakan konflik seperti halnya sikap panik menghadapi kobaran api kebakaran, sementara disisi lain mengabaikan untuk memperbaiki sumber dari kebakaran itu. Penanganan konflik dengan penyaluran tenaga Kepolisian, Brimob, TNI, dan pihak-pihak keamanan lainnya “diklaim” sebagai langkah utama dalam menangani konflik. Langkah ini Seperti halnya pemerintah menyelesaikan konflik pada masyarakat dengan cara penekanan tertentu dan mengabaikan akar dari permasalahan dari konflik yang sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan nilai budaya yang tercermin lewat budaya *maja labo dahu* yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat Bima sejak dahulu, budaya yang seharusnya membimbing masyarakat akan penting saling menghormati dan menghargai antar sesama, seakan telah dilupakan oleh masyarakat lebih-lebih pemerintah sebagai pucuk kekuasaan dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera.

Konflik di kabupaten maupun di kota Bima sulit dipahami dari perspektif homogenitas dalam sosial dan budaya, karena masyarakat yang konflik memiliki identitas sosial yang sama; pertama, sama-sama beragama Islam. Kedua, Sama-sama berlatarbelakang suku yang sama dan dialek bahasa Bima yang sama. Ketiga, sama-sama masyarakat petani yang hidup dari komoditi pertanian sawah dan kebun. Keempat, Bahkan warga yang berkonflik masih terikat dalam ikatan keluarga dan kerabat yang dekat. Faktor pembedanya hanyalah faktor wilayah administratif pemerintahan yakni desa atau kelurahan. Namun faktor pembeda yang relatif kecil tersebut cenderung menjadi faktor utama yang melakukan proses-proses pematangan eskalasi konflik dari konflik *laten* menjadi konflik terbuka/ *manifest*.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah jika konflik merupakan realitas dari kehidupan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat daerah yang tengah mengalami transisi pembangunan, lantas bagaimana menemukan resolusi konfliknya?. Maka berangkat dari fenomena sosial tersebut, peneliti berupaya untuk mengabdikan diri secara akademik untuk mengangkat judul penelitian tentang Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Renda dan Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memandang, bahwa konflik yang terjadi di kedua desa tersebut menjadi ikon dan stimulus bagi munculnya konflik-konflik di desa-desa lainnya di kabupaten dan kota Bima. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses resolusi konflik antara masyarakat desa Renda dan desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, Sebagaimana menurut Sutopo, peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data (Sutopo, 2006:40).

Penelitian ini diawali oleh deskripsi sumber masalah konflik antar masyarakat desa Renda dan Ngali, Akar masalah dari konflik masyarakat desa Renda dan Ngali secara laten telah terbentuk dari tradisi *ndempa ndiha* (perkelahian massal) yang kemudian membentuk sebuah bentuk karakter pemuda yang tangguh dan berjiwa pahlawan atau sejenisnya di tengah masyarakat. Hal ini pada umumnya cenderung dilindungi dan dijalankan secara bersama-sama oleh sekelompok pemuda atau masyarakat sebagai nilai persatuan atau solidaritas yang saling mengikat untuk melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun tradisi tersebut sudah lama hilang akan tetapi masih berjiwa mengakar dalam karakter masyarakat desa Ngali dan Renda dan muncul kembali dalam bentuk konflik kekerasan sosial. Kehidupan masyarakat Bima diikat kuat oleh nilai-nilai budaya *maja labo dahu* yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama.

Konflik manifest dalam masyarakat merupakan cerminan langsung dari konflik-konflik laten sebagai faktor secara tidak langsung. Ketegangan maupun rasa permusuhan yang mendasar tetap ada ditengah masyarakat/kelompok dibawah permukaan, solidaritas dan kekompakan yang nampak. Dalam mekanisme penyaluran konflik, ketegangan dapat terungkap melalui berbagai bentuk tindakan, baik antar pribadi maupun kelompok. Penyaluran konflik (*safety valve*) dapat berupa pengaturan terhadap resolusi konflik itu sendiri didalam masyarakat. Menemukan faktor penyebab dari konflik serta menyediakan resolusi konflik yang tepat.

Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengamati langsung fenomena sosial yang terjadi kemudian dianalisa dan ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:3). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam situasinya yang khusus (Sutopo, 2006:27). Pendekatan penelitian dengan pendekatan fenomenologi.

Dengan demikian, pemahaman keadaan realitas sosial tidak sebatas berdasarkan penelitian resolusi konflik di masyarakat Bima, peneliti berusaha menggali kembali peristiwa dan fenomena yang berlangsung untuk dikaji kembali dan menyajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti kemudian menyimpulkan beberapa saran sebagai resolusi konflik yang tepat dalam menangani konflik kekerasan di Masyarakat Bima, desa Ngali dan desa Renda kecamatan Belo yang bertikai.

Teknik pengambilan data wawancara mendalam, observasi, dan Dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* diklasifikasi berdasarkan Pengaruh, dan Peranan tokoh masyarakat dalam Resolusi konflik desa Ngali dan desa Renda. Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dan dengan menggunakan model analisis interaktif *Milles dan Huberman* yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa latin, *configure* yang bermakna memukul. Kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi *conflict* dan diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi konflik. Coser mendefinisikan konflik sebagai “*social conflict to mean a struggle over values and claims to scarce status, power and resources in which the aim of the proponents are to neutralize, injure or eliminate their rivals*” (Kinseng, 2014:11).

Coser meyakini, bahwa semua hubungan sosial mempunyai tingkat antagonisme tertentu, ketegasan, ketegangan, atau perasaan *negative* lainnya. Ketegasan dan perasaan

negatif merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, dan penghargaan lainya untuk dirinya (Johnson, 1986:199). Ralf Dahrendorf berpandangan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Sementara Turner juga menjelaskan bahwa konflik merupakan suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih (Raho, 2007:80).

Resolusi konflik adalah suatu istilah komprehensif yang berimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan (Miall, et. al. 2002:31). Rosolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik secara empiris.

3.1. Faktor Penyebab Konflik Di Masyarakat Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo

Perbedaan karakter individu dalam suatu desa meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap perbedaan ini terdapat karakter dasar yang mengikat keadaan suatu anggota masyarakat, yaitu norma dan etika. Kadang nilai yang mengikat ini bersifat tak nampak akan tetapi mengikat siapa saja yang berada dalam suatu tempat tersebut. Keadaan ini yang jika dilanggar oleh anggota kelompok desa lain akan berdampak saling bersitegang atau bahkan langsung menyerang lawan yang dianggap sebagai pelanggar nilai etika dan norma yang berlaku di desa setempat. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya.

Faktor penyebab konflik di desa Renda dan desa Ngali, Coser memandang bahwa tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan merupakan sebagai tanda-tanda yang hidup dari hubungan sosial, sedangkan dengan ketiadaan konflik dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan akan ada suasana yang benar-benar kacau (Poloma, 2004: 113). Konflik dalam masyarakat muncul dari interaksi individu antara satu dengan yang lainnya secara aktif. Adapun pertunjukan konflik merupakan situasi yang diakibatkannya.

Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik pertikaian antar warga kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat desa. Timbulnya korban dari pertikaian tersebut justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan. Penelitian ini mengkaji lebih jauh pandangan-pandangan dari informan baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun warga desa yang bertikai. Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan kolektif menggores luka besar, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok warga tertentu memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Coser meyakini bahwa semua hubungan sosial memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan, atau perasaan-perasaan negatif lainya (Johnson, 1986: 199).

3.2. Proses Resolusi konflik warga desa Renda dan desa Ngali Kecamatan Belo

Penyelesaian konflik antara desa Renda dan Ngali bukanlah hal yang mudah, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa ini cukup berdarah. Membutuhkan banyak energy untuk dikerahkan dalam melakukan urung rembung terhadap masalah yang sedang terjadi. Konflik yang berawal dari solidaritas kelompok didalam masyarakat Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok. Dalam mekanisme penyelesaian konflik Lewis A. Coser bahwa Ketegangan maupun rasa permusuhan yang mendasar tetap ada ditengah masyarakat/kelompok yang tidak terlihat atau yang bersifat laten (dibawah permukaan), solidaritas dan kekompakan yang nampak. Dalam mekanisme penyaluran konflik, ketegangan dapat terungkap melalui berbagai bentuk tindakan, baik antar pribadi maupun kelompok. Penyaluran konflik (*safety valve*) dapat berupa pengaturan terhadap resolusi konflik itu sendiri dari dalam masyarakat. Katup penyelamat merupakan suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial (Poloma, 2004: 108).

Proses penyelesaian konflik antara desa Renda dan desa Ngali terjadi berlangsung secara permanen, dan bersifat sementara. Penyelesaian konflik lewat musyawarah mufakat, dan lewat kepolisian atau pengadilan hanya bersifat sementara saja, pada substansinya permasalahan utama dari konflik tersebut belum tersentuh oleh berbagai pendekatan penyelesaian konflik pemerintah daerah Bima. Konflik yang terpendam (*laten*) terus mengontrol dan menumbuh kembangkan rasa permusuhan dari masyarakat itu sendiri. Potensi konflik antar desa di desa Renda dan desa Ngali bukan hanya terlahir sebagai solidaritas sosial semata, akan tetapi ada faktor yang paling mendasar pada semestinya mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah bupati dan walikota Bima tanpa harus mengesampingkan persoalan-persoalan lainnya dalam masyarakat. Katup pengaman konflik yang digagaskan Coser bukanlah solusi tanpa syarat, penyaluran konflik untuk menghindari dampak konflik yang menghancurkan objek aslinya sehingga menjadi konflik yang positif atau meminimalisir dampak negatif dari konflik sosial itu sendiri.

3.2.1. Penanganan Secara Musyawarah dan Mufakat

Konflik antar desa yang terjadi di desa Renda dan desa Ngali, banyak kalangan yang tidak menginginkan adanya, konflik lebih banyak memberikan kerugian ketimbang manfaat, arogansi dan ego pihak tertentu saja yang mencoba membiarkan konflik itu terjadi. Sebagai masyarakat yang giat bekerja keras dalam menumbuhkan ekonomi keluarga dengan mata pencaharian petani, merasa jenuh dan bosan jika aktifitas mereka dihambat oleh rasa takut dan tegang akibat konflik antar kampung mereka.

Musyawarah dan mufakat dalam konteks mempertemukan tokoh masyarakat yang berkonflik berlangsung dalam skala lokal desa sebagai bentuk penyelenggaraan kearifan local budaya *maja labo dahu* sebagai upaya menemukan penyelesaian konflik antara warga desa Renda dan Ngali, kesinambungan konflik akibat muncul dari sikap dan tindakan anggota kelompok warga yang cenderung menyalahi aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama. sebenarnya tingkat bertahannya perdamaian tersebut bukanlah pada proses perdamaian atau resolusi konflik, akan tetapi lebih mengarah pada kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kondisi yang ada.

3.2.2. Penanganan konflik berdasarkan Kronologis Konflik

Pemerintah daerah Bima bersama Kepolisian Resor dan Komandan komando distrik militer Bima dalam penanganan konflik di desa Renda dan Ngali harus mampu memfasilitasi jalannya perdamaian hingga tercipta resolusi konflik yang dapat bertahan lama dan mampu menjaring aspirasi masyarakat kedua desa yang berkonflik. Penggalan persoalan mendasar dalam masyarakat dapat terpecahkan dan penumbuhan

kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Bima secara kredibel dimata masyarakat. Penumbuhan kembali semangat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini harus dilakukan oleh pemerintahan daerah Bima secara menyeluruh, baik di tingkatan Pihak aparaturnya keamanan, Kejaksaan atau kehakiman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlebih lagi dalam hal ini Bupati Bima. Masyarakat justru cenderung menuduh keberpihakan kepolisian ketika konflik berlangsung. Begitu juga dengan pemerintahan dianggap cenderung berlandung dibalik situasi konflik ketika kasus-kasus di internal pemerintahan.

Ketegangan antara pemerintah desa, daerah, dan propinsi NTB dalam menyikapi konflik Renda dan Ngali akan konflik yang dipolitisir tidak bertahan lama, hal tersebut lebih diutamakan untuk memecahkan konflik dengan langkah islah kedua desa secara massa, kecamatan Belo mendapat sorotan secara kebijakan pemerintah, akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan tidak begitu menemukan langkah yang cepat, bahkan penyelesaian Konflik di desa Renda dan Ngali terkesan lambat, peneliti melakukan observasi lapangan dan penggalan informasi yang lebih mendalam, penyelesaian konflik kedua desa berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari tahun 2000 hingga sampai tahun 2010. Konflik di kecamatan Belo tersebut berdamai yang difasilitasi oleh Bupati Bima H. Feri Julkarnain, ST. pada tahun 2009, sementara tahun 2010 tersebut penyelesaian konflik hanya bersifat permanen saja, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh LKN ;

“Konflik pertama tahun 2000 setahun baru mendapat langkah rekonsiliasi yang formal dari pemerintah daerah Bima, kemudian konflik tahun 2010 selama setahun, itu konflik besar yang sudah menggunakan senjata api rakitan dan melibatkan seluruh masyarakat desa Ngali dan desa Renda, bukan berarti setelah itu tidak ada lagi konflik, konfliknya masih banyak lagi konflik yang kecil-kecil itu dan tingkat kerugiannya tidak seperti konflik yang terjadi pada tahun 2000 dan 2010 *tetap wara na, pala to'i mpa* (tetap ada, cuman sedikit saja). Yang paling besar konflik disini pada tahun 2010, sampai melibatkan Kapolda NTB harus menyisir kedua desa ini pakai helikopter di udarah...” (Sumber: Panduan wawancara no. I/d/2, 10 maret 2016).

Penganganan konflik yang berlangsung di desa Renda dan Ngali lebih cenderung pada peranan dari masyarakat itu sendiri, adapun upaya-upaya dari pemerintah daerah, institusi dari kepolisian maupun dari instansi lainnya merupakan penunjang saja. Bahkan bisa dikatakan keberadaan pihak kepolisian dalam penanganan konflik juga menyinggung perasaan masyarakat, konflik akan tertekan dibawah permukaan (*laten*) untuk sementara waktu sajadan dalam waktu tertentu akan kembali muncul.

3.2.3. Rekonsiliasi

Pemeliharaan perdamaian antara desa Renda dan desa Ngali Kecamatan Belo, tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Peranan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa kedua desa yang tengah berkonflik begitu penting dan menjadi penggerak utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi akar konflik antara desa Renda dan Ngali, upaya pemeliharaan konflik kedua warga menjadi hal utama yang diprioritaskan oleh pihak kepolisian, Kapolda NTB melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Penanganan pemulihan kembali suasana setelah konflik menjadi tugas utama pemerintah daerah dan pemerintah propinsi khususnya di daerah-daerah konflik, kecamatan Belo masuk sebagai daerah konflik yang berlangsung sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Penanganan konflik semenjak tahun 2000 diselesaikan lewat musyawarah dan mufak kedua tokoh dan pemuka adat masyarakat desa dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum komunikasi tingkatan desa dikecamatan Belo, sehingga langkah tindak lanjut terhadap

masalah inti cenderung terabaikan, untuk penanganan tindakan lanjutan untuk memulihkan keadaan sosial masyarakat itu sebenarnya tidak ada.

Resolusi konflik pada konflik antara masyarakat desa Renda dan Ngali cenderung bersifat permanen dan sementara, hal ini ditempuh lewat musyawarah dan mufakat, adapun yang melanggar dari kesepakatan damai tersebut, maka konflikpun akan kembali muncul dengan potensi konflik yang ada. Hal ini perlu adanya katup pengaman konflik sebagaimana yang ditawarkan oleh Coser, Katup pengaman berfungsi sebagai jalan keluar dari konflik yang meredakan permusuhan, tanpa Katup penyelamat maka hubungan-hubungan sosial sebagai pihak yang bertikai akan semakin tajam (Poloma, 2004: 108).

Proses penyelesaian konflik dalam konsep *safety valve* Coser mengharuskan penyelenggara dalam hal ini pemerintah daerah Bima mengeluarkan anggaran pemeliharaan perdamaian yang cukup dalam meredakan konflik yang ada. Konflik antar warga yang terjadi bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, berlangsungnya proses menginternalisasikan kekompakan kelompok itu sendiri dalam meningkatkan solidaritas internal, Coser memandang bahwa ketegangan antar kelompok masyarakat disebabkan oleh persoalan internal yang berpotensi merusak internal, kemudian menghindari potensi tersebut dengan memproyeksikan kesuatu sumber yang ada diluar kelompok tersebut. Sementara membangun hubungan eksternal kelompok muncul dengan beberapa alasan, seperti keinginan untuk berdamai dengan musuh dari luar dari pada aktif untuk terus melawan. Akan tetapi sikap keinginan berdamai dengan kelompok luar tersebut menjadi sasaran sikap dan tindakan frustrasi dan agresif kelompok itu, akan dianggap sebagai pengkhianat dalam kelompok.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian resolusi konflik antar masyarakat desa Ngali dan desa Renda kecamatan Belo Kabupaten Bima, Penelitian yang berlokasi di kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Konflik antara desa Renda dan desa Ngali telah berlangsung dalam waktu yang lama, Penyelesaian konflik antara desa Renda dan Ngali bukanlah hal yang mudah, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa ini cukup berdarah. Membutuhkan banyak energi untuk dikerahkan dalam melakukan urung rembung terhadap masalah yang sedang terjadi. Konflik yang berawal dari solidaritas kelompok didalam masyarakat Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok.

Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat dipahami sebagai akibat tidak terbangunnya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara masyarakat desa yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif.

Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan, bahwa Proses resolusi konflik yang dipakai dalam menganani Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat permanen sebagaimana aktifitas sosial keseharian masyarakat desa. Bentuk penanganan konflik di desa Renda dan Ngali antara lain; Pertama, melalui Musyawarah dan Mufakat pendekatan kearifan lokal Budaya *maja labo dahu*, Kedua, Penanganan konflik berdasarkan Kronologis Konflik, dan Ketiga, melalui Rekonsiliasi, yaitu pemeliharaan hubungan antara warga desa Renda dan Desa Ngali kecamatan Belo Kabupaten Bima. Konflik antara masyarakat desa Renda dan Ngali, dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan menghilangkan pihak lainnya.

Penyelesaian konflik yang bersifat menekan dari pihak kepolisian atau militer, tidak akan menyelesaikan masalah. Tindakan yang bersifat menekan sumber masalah tanpa adanya solusi yang jelas, bisa dikatakan itu akan menjadi sumber konflik laten bagi munculnya konflik lanjutan kedepanya. Konflik membutuhkan peranan banyak pihak dalam

meneyelesaikanya. Resolusi konflik yang dapat di tawarkan dalam kasus Masyarakat desa Renda dan Ngali tahun 2009-2010 tersebut yaitu: 1), menghidupkan kembali nilai Budaya *maja labo* di masyarakat. 2), penyelesaian konflik lewat pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu jawaban dari masalah yang muncul ditengah masyarakat. 3), penegakan hukum oleh pihak kepolisian harus benar-benar merata, tanpa pandang bulu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mis-kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum. 4), peranan dari pemerintah akan pentingnya terhadap kesadaran hukum itu sangat diperlukan. Kalau masyarakat sudah sadar akan hukum, maka potensi konflik dengan sendirinya akan terarah pada pihak penegakan hukum, atau konflik itu akan diselesaikan lewat hukum atau pengadilan.

Penelitian tersebut bertujuan menyadarkan pada masyarakat, bahwa Resolusi konflik yang diambil sebagai langkah penyelesaian konflik dengan penuh ketelitian. konflik sosial yang melibatkan antar warga desa lebih banyak merugikan ketimbang manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Konflik menciptakan ketegangan sosial, menimbulkan korban jiwa, daya intimidasi yang besar skalanya, pada konflik di desa Renda dan desa Ngali mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2010, jatuhnya korban jiwa dalam setiap konflik hampir tidak dapat di hindari. Sementara fungsi positif dari konflik yaitu meningkatkan solidaritas kekerabatan di tingkatan desa cenderung massif, tingkat pengontrolan budaya terhadap masyarakatnya lebih tinggi dibanding desa-desa lainnya. Konflik juga menjadi penghambat dalam aktifitas masyarakat yang bertani, khususnya masyarakat desa Renda dan desa Ngali yang rajin bekerja di lahan pertanian, desa yang berpenghasilan bawang terbesar di kabupaten Bima.

REFERENSI

- Ardiansyah, Syaifuddin Iskandar. 2010. Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB. Volume 23, Nomor 4, Halaman 286-292.
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Demartoto, Argyo. 2010. Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. *Dilema, Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret*. ISSN : 0215 - 9635, Volume 24 Nomor 1.
- Eka, Hendry Ar., et. al. 2013. Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik. *Walisongo*, Volume 21, Nomor 1.
- Ilyas. 2014. Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Academica fisip UNTAD*. Volume 06 Nomor 01.
- Jamuin, Ma'rif. 2004. *Manual advokasi: Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*. edisi kedua. Kartasura: Ciscore Indonesia
- Jamil, M. Muksin. et, al. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre).
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. University of florida. Jilid II. (Diterjemahkan oleh Robert M.z. Lawang). Jakarta: Gramedia.
- Mandan, Ali. 1959. *Ralf Dahrendorf : Konflik dan konflik dalam masyarakat industri: Sebuah analisis kritik Ralf dahrendorf*. Ed. 1, cetakan 1. Jakarta: Raja Wali.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*:. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.

- Miall, Hugh. et, al., 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer; Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Poloma, Margaret M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raho. Bernard, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rozi, et al., 2006. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Susan. Novri. 2009. *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Natsir, M., et al. 2013. Model Resolusi Konflik Komunal di Bima Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Communal Conflict Resolution Model in Bima Regency West Nusa Tenggara Province*). *Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Fellowship pasca sarjana*. Volume 1 Nomor 12.
- Muhlis. 2013. Traditional Conflict and its Interventions. *Walisono*. Volume 21. Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2012 . Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Wirawan. 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjajanto, Andi. 2004. Empat tahap Resolusi Konflik. Tempo interaktif.